

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

International Relations sering disingkat HI adalah nama singkatan subjek akademis Hubungan Internasional. Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Menjadi semakin kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai segi lain yang koordinasinya tidak sederhana. Seluruh penduduk dunia terbagi menjadi komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. (Dewi Triwahyuni, 2015)

Hubungan Internasional tentunya mempelajari hubungan antarnegara, termasuk didalamnya peran, organisasi dalam suatu negara termasuk *Inter-Governmental Organization* (IGO), *International Non-Governmental Organization* (INGO), *Non-Governmental Organization* (NGO), dan *Multinational Corporation* (MNCs). Hubungan Internasional dapat terjadi apabila suatu negara berinteraksi dengan negara lain. Seiring berkembangnya zaman,

cakupan studi Hubungan Internasional tentunya meluas. Tidak hanya aktor negara saja yang berperan aktif, aktor non-negara pun menjadi studi dalam Hubungan Internasional (Ambasari Novita Yeny, 2016)

Hubungan Internasional menjadi sesuatu yang penting atau utama bagi suatu negara untuk melakukan interaksi dengan negara lain di dunia Internasional. Bukan hanya interaksi seperti kerjasama saja yang dikaji dalam studi Hubungan Internasional, peperangan, pertikaian antar dua negara atau lebih pun menjadi pembahasan dalam studi ini. Bahkan Hubungan Internasional sendiri terbentuk oleh peperangan, yang kemudian dikaji agar para penstudinya paham dengan istilah perang dan damai. Memasuki zaman modern, Hubungan Internasional pun mengalami sebuah perkembangan dalam hubungan antara suatu negara dengan negara lain, hubungan antara negara dengan aktor non-negara, juga hubungan antar aktor non-negara, yang kemudian disebut dengan Hubungan Internasional Kontemporer (Rudy, 2003:51).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi antara dua negara atau lebih yang memiliki beberapa pengertian. Hubungan Internasional memiliki sifat yang kompleks dan interdisipliner, karena yang bersangkutan memiliki kedaulatan masing-masing yang beragam. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dibandingkan dengan hubungan antar individu dalam suatu negara. Tujuan dari Hubungan Internasional itu sendiri adalah memberikan lahan untuk para penstudi hi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perilaku internasional yakni perilaku aktor negara maupun non-negara (Bitar, 2019 : gurupendidikan.co.id). Perilaku disini bentuknya bermacam-macam

seperti konflik, perang, kerjasama, membangun sebuah aliansi, interaksi dalam sebuah organisasi internasional, dan lainnya.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Negara merupakan aktor yang memiliki peranan penting dan dapat mengambil keputusan dalam melakukan interaksi internasional dan berpengaruh bagi masyarakat yang ada di negaranya. Negara dipandang sebagai pelindung di suatu wilayah, bagi penduduk, dan memiliki cara hidup yang khas dan berharga, begitulah kesimpulan negara yang dijelaskan oleh seorang ahli bernama Thomas Hobbes. Demikian dikarenakan negara merupakan suatu yang esensial bagi kehidupan masyarakatnya. Tanpa adanya negara dalam menjamin suatu kondisi yang bertujuan untuk memajukan masyarakat, maka kehidupan bermasyarakat pun akan sangat dibatasi (Robert Jackson, 2009:89).

Suatu kepentingan muncul dari kebutuhan suatu negara, yang dapat dilihat dari kondisi internalnya baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan social budaya. Kepentingan nasional juga didasari oleh *power* yang ingin diciptakan oleh suatu negara yang dapat memberikan dampak bagi perkembangan negara tersebut agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia. Peran suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya tidak dipungkiri menjadi kacamata bagi masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan dari kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional secara konseptual dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai perilaku politik luar negeri suatu negara (P. Anthonius Sitepu, 2011:21).

Kindleberg memaparkan kepentingan nasional sebagai;

“..hubungan antar negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki oleh setiap negara. keunggulan komparatif tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya..”

Pengertian tersebut tentu menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kapasitas yang beragam. Keberagaman tersebut dapat tercipta dari pengaruh demografi, karakter, budaya, bahkan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut. Pelaksanaan kepentingan nasional dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral yang kembali pada kebutuhan masing-masing negara. adanya kepentingan nasional memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang menjadi identitas dari suatu negara yang dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J Morgenthau memiliki artian sebagai keberagaman hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri (P. Anthonius Sitepu, 2011:165).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai pungguk dalam tututan yang membahas kepentingan dari aktor-aktor yang bersangkutan yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam suatu negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasionalnya sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan (Putri Aini Zahra, 2013 : putri-aini-fisip13.web.unair.ac.id).

Kepentingan suatu negara dalam memperkenalkan identitas mereka tentunya memiliki kegunaan-kegunaan tersendiri. Hal ini dijelaskan oleh James N Rosenau yaitu pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri, dan yang kedua, yaitu sebagai alat untuk melancarkan tindakan politik yakni sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan. Dengan demikian, negara-negara yang bekerjasama tidak akan menyesal di masa mendatang (Hanifah, 2014). Tentunya kondisi ini menjelaskan akan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang merencanakan sebuah kerjasama. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengamatan akan kondisi suatu negara yang akan diajak untuk bekerjasama.

2.1.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sebuah kajian dalam ilmu Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan suatu politik luar negeri berperan penting atau utama dalam hubungan internasional, meskipun banyak pula aktor-aktor non negara yang sudah berperan dalam hubungan internasional. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Petric, 2013:76). Politik luar negeri

suatu negara berbeda dengan negara lain. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri. Politik luar negeri tergantung pada tujuan nasional suatu negara. Kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Secara umum faktor-faktor internal tersebut antara lain adalah faktor historis, geografis, demografis, sistem politik, cara pandang aktor-aktor politik terhadap sistem internasional, serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh negara tersebut. (Triwahyuni D, Fitri. 2011). Dalam Politik Luar Negeri, strategi merupakan pola perencanaan yang digunakan para pembuat keputusan untuk memajukan serta mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya dengan disertai usaha mencegah negara lain melakukan benturan atau menghambat tercapainya kepentingan tersebut. (Triwahyuni D, Agustin T, 2016)

Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup internasional. Politik luar negeri juga merupakan sebuah strategi politik nasional suatu negara yang berbeda dengan strategi negara lain. Umumnya, politik luar negeri merupakan suatu strategi untuk menjalin suatu hubungan dengan negara lain yang didasari oleh sikap, nilai, arah, juga sasaran kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional. Politik luar negeri mencerminkan beban yang ditimpakan kedalam konsensus dalam negeri oleh persyaratan-persyaratan penyerahan kedaulatan yang bersifat kontroversial (Andrias Darmayadi, 2012). Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang beragam tergantung dengan kepentingan nasional negara tersebut.

Politik luar negeri merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan juga sekaligus memajukan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional. Melalui sebuah strategi atau rencana yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Luar Negeri. Politik Luar Negeri ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap pemerintah lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang memiliki peran dan tentunya berpengaruh dalam hubungan antar pemerintah. dengan kata lain, politik luar negeri merupakan sebuah sintesa dari penjawarantahan kapabilitas nasional (Columbus, 1986:89-90).

Politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dalam dan luar negeri. Politik luar negeri merupakan keinginan dan aspirasi seluruh masyarakat suatu negara yang diperjuangkan oleh pemerintahnya agar mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dengan upaya untuk memperkenalkan negara tersebut di kancah politik internasional. Faktor dalam negeri yang mempengaruhi politik luar negeri ialah system pemerintahan suatu negara, keadaan wilayah, tujuan nasional suatu negara, kepentingan nasional, dan ideologi bangsa. Selain yang disebutkan diatas, pergantian pemimpin pemerintahan juga mempengaruhi politik luar negeri karena pada dasarnya setiap pemimpin memiliki kebijakan tersendiri terhadap politik luar negeri negaranya (Lentera Kecil, November 2016 : lenterakecil.com)

Faktor luar negeri yang mempengaruhi politik luar negeri salah satunya adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, hubungan antara suatu negara dengan negara lain mempunyai jalan yang lebih mudah. Dengan adanya

perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang pesat, tentunya memudahkan masyarakat untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain. Dengan adanya globalisasi pula, setiap negara dituntut untuk melakukan hubungan dengan negara lain namun tidak lepas dari kepentingan nasional negara-negara yang menjalin suatu hubungan (Andrias Darmayadi,2019) . Kepentingan nasional negara ini akan memberikan pengaruh juga pada kebijakan luar negeri negara tersebut.

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tentunya terdapat sumber-sumber utama dari politik luar negeri, diantaranya adalah (Aneska Zoya Raveena, 2017, dictio.co.id) :

- Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu lainnya,
- Sumber masyarakat, yaitu berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan juga opini publik,
- Sumber pemerintah, sumber internal yang menjelaskan pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintah,
- Sumber ideosinkratik, yaitu sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat, juga kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Politik Luar Negeri yang bersifat bebas aktif anti Imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk, mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat serta diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di Dunia. (Dewi Triwahyuni, 2010). Pada masa ini politik luar negeri suatu negara berbeda dengan negara lain. Setiap negara mempunyai kebijakan luar negeri sendiri. Selain empat sumber diatas, terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis, serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat.

2.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah salah satu unsur penting dalam membentuk sebuah fenomena yang internasional. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dapat memunculkan sebuah interaksi. Sebagian kebijakan dikalkulasikan dengan baik dan kebijakan lain dapat diterapkan langsung dengan hanya mengandalkan intuisi (Mintz & DeRouen, 2010:3). Kalkulasi sebuah kebijakan menandakan bahwa isu-isu domestic tentunya dapat menentukan bagaimana sebuah kebijakan ditetapkan. Nilai-nilai yang telah melekat dalam lingkungan domestic mampu mempengaruhi bagaimana pola politik internal dan membentuk tindakan terhadap lingkungan eksternal. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi serta memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau, Boyd, & Thompson. 1976, hal.27). Rosenau juga menambahkan bahwa terdapat pula variable individu sebagai *decision maker* yang mana adalah Kepala Negara atau

Pemerintah tentang persepsi, karakter pribadinya, dan khususnya kesan yang dapat memberikan corak bagi politik luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional, sehingga pemaparan kedalam tujuan kebijakan luar negeri (*foreign policy objective*) yang lebih signifikan dan dapat diukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, sangat diperlukan (Triwahyuni D, 2008)

Kebijakan luar negeri atau dapat disebut juga sebagai politik luar negeri dapat dilihat atau dipandang sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan kekuatan dan kapabilitas suatu negara dan hal ini juga dapat menandakan bahwa kebijakan luar negeri mendapatkan nilai lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama suatu negara yang diinginkan dan harus dicapai. Kebijakan luar negeri bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara (Rosenau, Boyd, & Thomposon. 1976, hal. 32). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memahami perilaku politik luar negeri. Willian D. Coplin mengidentifikasikan ada 4 indikator politik luar negeri, yaitu (Ahmad Jay, 2017. dictio.id):

- Konteks internasional, artinya politik internasional yang sedang terjadi dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara berperilaku. Dalam kaitan ini, Coplin lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat tiga elemen yang penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu geografi, ekonomi, dan politik.

- Perilaku para pengambil keputusan, hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara yang ada di suatu pemerintahan. perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri.
- Kondisi ekonomi dan militer suatu negara, kemampuan ekonomi dan militer ini dapat memberikan pengaruh terhadap negara tersebut dalam interkasinya dengan negara lain.
- Yang terakhir adalah politik dalam negeri, dalam perspektif ini adalah system pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta apa pengaruhnya terhadap dunia perpolitikan nasional negara yang bersangkutan. Situasi politik yang terjadi dalam negeri akan menimbulkan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri.

James N. Rosenau menjelaskan kebijakan luar negeri sebagai;

“..kebijakan luar negeri atau foreign policy adalah keputusan seorang individu, musyawarah suatu komite, hasil dari proses pembuatan kebijakan, pendapat sejumlah kelompok yang berbeda kepentingan, nilai-nilai elite yang dominan, produk dari aspirasi masyarakat , penguatan tradisi sejarah, sebuah respon terhadap peluang atau tantangan dunia. Interaksi antara tujuan nasional dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut adalah subjek mutlak dalam suatu negara. Unsur-unsur Politik Luar Negeri pada setiap negara baik negara besar maupun kecil adalah sama.”

Menurut pemikiran James N. Rosenau, ada 5 variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (foreign policy),

yaitu : variabel individu (ideosinkretik), variabel group atau peranan (role), variabel birokrasi, variabel nasional dan variabel sistemik (Rafania Sabrina dalam academia.edu). Pertama, variabel Individual atau ideosinkretik berkaitan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Artinya dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis. Pengaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya. Umumnya negara yang kebijakannya ditentukan oleh keputusan individu adalah negara otoriter, atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi.

Kedua, variabel Groups atau peranan dapat didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang diharapkan publik kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan memandang bahwa keputusan final yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan manifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lain yang mempunyai posisi strategis dan kepentingan tertentu di pemerintahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga, variabel birokrasi, menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Allison yang memperkenalkan variabel ini mengatakan bahwa dengan memandang politik sebagai rencana-rencana yang diturunkan secara rasional yang dirancang untuk memaksimasimasi kepentingan utama unit-unit abstrak dan monolitik yang kita sebut negara. Artinya keputusan tidak dipandang sebagai

produk rasionalitas individu tetapi lebih merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi . Jadi, kebijakan luar negeri merupakan proses politik yang meliputi bargaining, kompromi dan adjustment antar biro pemerintah, dinas militer dan divisi-divisi lainnya.

Keempat, variabel nasional, mencakup berbagai atribut nasional yang turut mempengaruhi hasil politik luar negeri, termasuk pula di dalamnya unsur-unsur power, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem yang berupa sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial-budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional masing-masing negara. Misalkan tindakan Korea Utara yang menutup diri dari pasar global dikarenakan negara tersebut menganut ideologi *self-reliance*. Dan yang terakhir, variabel sistemik (global system) memandang pentingnya pengaruh lingkungan eksternal suatu negara terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut. Lingkungan eksternal yang dimaksud meliputi struktur atau keadaan sistem internasional (dan proses sistem internasional. Yang meliputi struktur hubungan antar negara-negara besar, regional, aliansi, rezim internasional, hubungan bilateral atau multilateral, serta faktor situasional seperti isu dan krisis.

2.1.5 Intervensi

Konsep intervensi merupakan sebuah konsep tentang sebuah tindakan campur tangan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam urusan negara-negara lain dengan menggunakan kekuatan dan ancaman kekuatan (Garner. 1999, hal.826). Dalam hukum internasional, intervensi bukan merupakan campur tangan suatu negara terhadap negara lain, tetapi cakupannya lebih sempit yaitu tindakan campur tangan negara yang memiliki sifat menekan menggunakan alat-alat kekerasan atau memberikan ancaman untuk melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak tercapai (Dr. WirjonoProdjodikoro. 1967, hal. 149-150).

Menurut J.G. Starke, ada tiga tipe yang membedakan sebuah intervensi dengan intervensi lain yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain, yakni (Starke. 1988, hal.136-137):

1. Intervensi internal, yaitu intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain,
2. Intervensi eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan oleh suatu negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain, dan
3. Intervensi *punitive*, yaitu intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai suatu upaya pembalasan atas kerugian yang dialami oleh negara tersebut

2.1.6 Krisis Politik dan Keamanan Nasional

Krisis merupakan suasana dimana keadaan pada saat itu terasa sangatlah buruk dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diprediksi baik bagi seorang individu, kelompok, organisasi, bahkan bagi suatu negara. untuk mengatasinya

tentu membutuhkan langkah yang cerdas agar dapat mengantisipasi, mencegah atau bahkan bertahan pada kondisi tersebut. Politik merupakan proses pembuatan keputusan oleh pemerintah bagi kepentingan negaranya (Brainly, Desember 2019). Krisis politik memunculkan rasa tidak percaya bagi masyarakat terhadap pemerintahnya dan juga dapat mengakibatkan bubarnya suatu organisasi atau lebih buruk lagi bubarnya suatu negara.

Krisis politik dapat diartikan sebagai salah satu tindakan atau masalah yang mana pemerintah tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan tentunya diakibatkan oleh masalah politik seperti krisis kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya atau adanya perselisihan kaum birokrat dengan wakil-wakil rakyat karena mereka terlalu mementingkan kepentingan internal daripada eksternal yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan lancar karena untuk menetapkan sebuah kebijakan, seorang presiden membutuhkan persetujuan dari para wakil rakyat dan begitu pula sebaliknya (Brainly, diakses pada 19 Desember 2019).

Keamanan nasional menunjuk pada kebijakan public untuk memastikan keamanan serta keselamatan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan juga penjalanan diplomasi, baik dalam kondisi damai maupun perang. Untuk mewujudkan keamanan nasional suatu negara, harus mempunyai keamanan ekonomi, energy, lingkungan, dan lain-lain. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh seperti negara lain, melainkan juga dapat datang dari kepercayaan masyarakat negerinya atau organisasi lain diluar system diplomatiknya, seperti MNCs, LSM, Bandar narkoba, yang memiliki perbedaan pemikiran dengan pemerintah (Roger dalam dictio.id, Januari 2017).

Dalam konsep tradisional, para ahli menjelaskan bahwa keamanan ialah suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman, ketakutan, kecemasan, dan bahaya lain. Suatu bangsa ada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang, penjelasan keamanan yang dipaparkan oleh Walter Lippmann. Hanya sedikit negara-negara yang mengalami persoalan fundamental mengenai formasi dan institusi pengorganisasian negara.

Barry Buzan menawarkan tiga landasan keamanan nasional, yaitu landasan ideasional, landasan institusional, dan landasan fisik. Yang pertama landasan ideasional, landasan ini mencakup hal yang bermacam-macam termasuk gagasan mengenai wawasan kebangsaan. Kedua landasan institusional, landasan ini meliputi seluruh mekanisme kenegaraan, termasuk didalamnya lembaga legislative dari ketentuan hukum atau eksekutif, prosedur, dan norma-norma kenegaraan. Ketiga landasan fisik, yang meliputi penduduk dan wilayah dan juga segenap sumber daya yang ada dalam lingkup teritorial suatu negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional atau interaksi antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi apabila adanya suatu kepentingan nasional yang harus dicapai oleh suatu negara. seiring dengan perkembangan zaman, aktor dalam hubungan internasional juga berkembang dan mengalami perubahan dimana yang awalnya

aktor dalam hubungan internasional hanya negara saja pada hari ini kita mempelajari juga mengenai aktor lain dalam hubungan internasional yang aktor non-negara yang turut berperan aktif. Isu internasional juga banyak mengalami perubahan dan perkembangan sehingga tidak hanya terfokus pada isu politik saja.

Negara memiliki peranan penting dalam mencapai kepentingan nasional, dan juga sebagai aktor yang dapat mengambil keputusan dan berpengaruh bagi masyarakat di negaranya. Kepentingan nasional ini tercipta dari kebutuhan di suatu negara. dapat dilihat dari kondisi internal maupun kondisi politik-ekonomi, militer, dan social budaya. Dengan demikian kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara, terciptalah yang dinamakan sebagai politik luar negeri atau kebijakan luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya, dan juga dapat mencerminkan bagaimana karakter negara tersebut dalam melakukan kerjasama dengan negara lain.



